

BAB II

GAMBARAN UMUM RELAWAN POLITIK

Bab ini menjelaskan awal mula kehadiran relawan politik dalam ruang politik melalui gerakan kesukarelawanan. Gerakan kesukarelawanan yang selama ini hanya dikenal sebagai bentuk gerakan sosial non-partisan berkembang menjadi mesin politik pemenangan. Secara umum bab ini menjelaskan fenomena relawan politik pada kontestasi Presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019.

Kehadiran sukarelawan dalam politik terkait dengan gagasan abstrak kesukarelaan yang digolongkan sebagai model partisipasi sipil dari keterlibatan publik (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Relawan politik merupakan salah satu implementasi wujud kesadaran masyarakat tentang politik. Kesadaran ini muncul dilatarbelakangi bilamana warga Negara mencapai kemapanan dalam kehidupannya. Hal ini secara perlahan dapat meningkatkan partisipasi politik warga Negara yang berakibat pada menguatnya nilai-nilai voluntarisme dalam politik untuk dapat bekerja.

Relawan politik dimasa lalu lebih sering disebut sebagai simpatisan. Mereka adalah masyarakat umum yang tidak terafiliasi pada salah satu Partai Politik tetapi tergerak untuk mendukung Partai Politik atau bakal calon yang dipandang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Munculnya relawan politik tidak bisa

dilepaskan dari budaya masyarakat Indonesia yang pada dasarnya senang bergotong royong. Bantu membantu merupakan jiwa yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai pengejawantahan kemanusiaan itu sendiri (Samah dan Susanti, 2011).

Nina Eliashop dalam bukunya *The Politics of Volunteering* (2013), dengan pasti menyebutkan bahwa keberadaan dan kegiatan relawan politik terbukti mampu meningkatkan partisipasi publik dalam setiap agenda politik. Keberadaan relawan politik merupakan bentuk nyata partisipasi sukarela yang tinggi. Hal ini menurut Alexis de Tocqueville, dalam bukunya *Democracy in America* (2000), akan menyebabkan praktik demokrasi berjalan sukses, dengan ditandai menjamurnya asosiasi publik dalam kehidupan sipil sebagai wujud kesadaran dan partisipasi publik.

Keberadaan voluntarisme dalam kehidupan politik akan selalu berdampingan dengan partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1977) membedakan sifat partisipasi politik kedalam dua karakter, pertama partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela. Artinya warga Negara secara sadar memperjuangkan hak otonomnya tanpa ada intervensi, yang bersifat memaksa diluar dirinya yang dilakukan aktor lain maupun pemerintah. Kedua, partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan. Artinya partisipasi politik warga Negara digerakkan atau dimobilisasi oleh aktor Negara bukan atas kesadaran pribadi yang otonom.

Hal ini senada dengan gagasan McClosky (1972) bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung, serta turut andil dalam proses pembentukan kebijakan publik. Kaase dan Marsh (1979) mengatakan bahwa secara umum partisipasi politik terdiri dari dua bentuk, yakni : konvensional dan non konvensional. Bentuk konvensional mencakup segala aktivitas oleh warga Negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir (*outcomes*) dari proses politik yang sesuai dengan prosedur dan aturan baku, seperti pemungutan suara calon untuk menduduki jabatan tertentu atau kampanye menjelang Pemilu. Bentuk non konvensional mencakup segala kegiatan warga Negara yang dilakukan untuk mempengaruhi hasil akhir politik, yang tidak berhubungan dengan norma-norma hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik di bawah suatu rezim tertentu, seperti demonstrasi, mogok kerja, atau perusakan fasilitas umum sebagai bentuk protes terhadap keputusan tertentu dari pemerintah.

Berdasarkan definisi partisipasi Kaase dan Marsh (1979) & Huntington dan Nelson (1977) gerakan relawan politik idealnya merupakan wujud partisipasi yang konvensional dan bersifat otonom, yang secara spesifik ditujukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum dengan keterlibatan aktif dalam pemenangan kandidat tertentu. Gerakan ini dapat dikategorikan sebagai gerakan informal, karena gerakan ini tertuju pada kegiatan kesukarelaan. Namun perlu digaris bawahi bahwa gerakan dalam voluntarisme politik akan sangat dekat

dengan isu-isu penting di ranah kekuasaan. Salah satunya terlibat aktif dalam lingkaran perubahan jabatan politik melalui keterlibatan politik aktif.

Kemunculan relawan politik di Indonesia pada era pasca reformasi merupakan bentuk dari sebuah kebebasan berpolitik. Era pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada Tahun 2009 mulai membuka mata kita tentang keterlibatan relawan politik dalam kontestasi Pilkada hingga Pilpres. Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 keterlibatan relawan politik pada kemenangan Jokowi-Ahok memiliki peranan penting karena pasangan Jokowi-Ahok merupakan pendatang baru dalam Pilkada Jakarta dan hanya di dukung oleh dua Partai Politik yakni PDI Perjuangan dan Gerindra (Alam, et al., 2017: 144).

Relawan politik yang sempat populer dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 yakni Jokowi Ahok Sosial Media Volunteers (Jasmev), tugas dari relawan ini adalah untuk *mengcounter* isu-isu negatif, provokatif dan fitnah terhadap pasangan Jokowi-Ahok, baik melalui media massa dan media sosial. Selain berfungsi untuk *mengcounter* isu-isu negatif, pembentukan Jasmev ini juga sebagai strategi sosialisasi terhadap keunggulan hingga prestasi Jokowi-Ahok dan sebagai wadah untuk menjaring relawan baru yang ingin ikut mengkampanyekan Jokowi-Ahok melalui media sosial (Iqbal, 2013: 103).

Gerakan voluntarisme dapat dimaknai sebagai implementasi dari kedaulatan akan hak-hak warga Negara yang merdeka. Dewasa ini relawan politik telah menunjukkan perkembangan, dari perspektif partisipasi dan kesadaran politik. Mereka membentuk sebuah aliansi dengan para kandidat atau aktor-aktor politik

yang memiliki jalan pikiran yang sama, dalam proses mensukseskan kampanye para aktor politik tersebut melalui gerakan informal (Tomsa & Setijadi, 2018: 557). Aktivitas kampanye relawan politik dapat diklasifikasikan sebagai gerakan, karena mereka menunjukkan elemen-elemen kunci dari suatu tipikal gerakan, termasuk orientasi konflik ke arah lawan, identitas kolektif berdasarkan pada nilai-nilai umum, kepercayaan, dan tujuan, serta repertoar aksi kolektif (Caramani, 2011: 293).

Kehadiran gerakan relawan politik merupakan aktivisme baru diluar aktivisme klasik yakni, terlibatnya mesin-mesin pemenangan Partai Politik dalam politik elektoral. Gerakan relawan politik berfokus pada kandidat yang terlibat dalam politik elektoral. Dimensi baru yang lahir berkat menguatnya peranan relawan politik dalam Pemilu di Indonesia setidaknya memiliki dua dampak penting. Pertama, gerakan ini berpotensi dapat meminimalisir maraknya penggunaan *money politics* dan penggunaan konsultan profesional yang syarat akan kepentingan materialistis. Kedua, gerakan ini menghadirkan tantangan bagi supremasi Partai Politik dalam konteks Pemilu, karena mereka tidak hanya melengkapi peran Partai Politik namun kadangkala mampu mengambil alih fungsi-fungsi penting yang secara konvensional dianggap sebagai *domain* Partai Politik.

1.1 Pemilihan Presiden Tahun 2014

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2014 Presiden dan

Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode masa jabatan Tahun 2014 sampai Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli Tahun 2014. Pemilihan ini menjadi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ketiga di Indonesia. Berkaitan dengan peta politik partai pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Tahun 2014 sangat bergantung pada konstelasi politik menjelang pemilu legislatif pada 9 April Tahun 2014.

Pada Mei Tahun 2013 Center for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei tentang kandidat capres pada pemilu Tahun 2014. CSIS (2013) melaporkan dari sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen), dan Jusuf Kalla (3,7 persen). Hasil dari survei CSIS menempatkan Jokowi di peringkat pertama sebagai tokoh calon Presiden alternatif.

Pada tanggal 31 Mei Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014. Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN),

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat (Bachtiar, 2014). Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Aji & Indrawan, 2020).

Hasil perhitungan suara resmi menunjukkan kemenangan bagi pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak pemilu Presiden Tahun 2014. Jokowi – JK meraih kemenangan 70.997.833 atau 53,15 persen. Dan perolehan suara dari pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa adalah 62.576.444 atau 46,85 persen. Jokowi – JK unggul 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa (Djuyandi, 2014).

Secara akumulasi kursi di DPR RI, Koalisi Merah Putih yang merupakan pendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa jauh lebih unggul dibandingkan Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung pasangan Jokowi – JK. Namun, hal ini tidak sejalan dengan perolehan suara Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Pada kontestasi Presidensial Tahun 2014 menguatnya peranan *civil society* dalam ruang politik melalui gerakan kesukarelawanan berdampak positif terhadap kemenangan Jokowi – JK. Gerakan kesukarelawanan yang dilakukan secara masif dan bertolak belakang dengan pendekatan pragmatis partai politik terbukti

dapat menjadi penyeimbang kekuatan oligarkis elit politik pada kontestasi Presidensial Tahun 2014.

1.2 Relawan Politik di Indonesia

Gerakan non-partisan seperti yang ditunjukkan oleh relawan politik telah mampu mendorong perubahan dari luar sistem politik formal, yang selama ini belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Kemunculan serpihan-serpihan gerakan sosial non-partisan yakni relawan politik telah mampu menumbangkan oligarkis Partai Politik yang sekaligus membangun pelembagaan demokrasi partisipatoris. Dalam hal ini demokrasi partisipatoris diartikan sebagai demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik, baik langsung maupun tidak langsung, dimana rakyat dapat mengajukan usul, masukan mengenai kebijakan apa yang akan ditetapkan oleh pemerintah (Fikri, 1999).

Sebelum sukses memenangkan Jokowi, Indonesia memiliki banyak kisah bagaimana relawan dan media sosial membantu banyak gerakan-gerakan warga. Salah satu yang paling menarik dan kemudian menjadi *role model* adalah “Gerakan Satu Juta Petisi di Facebook untuk Prita”. Seorang wanita yang dituduh menyebarkan fitnah dan kebencian di internet terhadap sebuah Rumah Sakit swasta. Kemudian dibebaskan setelah masifnya kampanye membelanya, namun Prita masih harus menghadapi proses persidangan di pengadilan bahkan dijatuhi vonis bersalah serta harus membayar denda pencemaran nama baik oleh pengadilan.

Relawan kemudian menggelar kampanye *Coin for Prita* untuk membantu Prita membayar denda kepada Rumah Sakit yang mengaku dirugikan (Projo, 2017).

Pasca kemunculan relawan politik dalam kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, kemunculan relawan politik juga semakin bertambah dalam Pilpres Tahun 2014. Pada Pilpres Tahun 2014, Jokowi-JK tampil sebagai figur yang memberi harapan dengan menggerakkan peran relawan. Jokowi-JK mengesampingkan peran Partai Politik sebagai mesin utama untuk meraup suara melainkan mengedepankan fungsi relawan sebagai mesin politik utama. Fenomena ini dibuktikan dengan ramainya *event-event* kampanye Jokowi-JK yang diselenggarakan oleh komunitas relawan. Termasuk *event* yang diselenggarakan secara independen oleh artis ibukota dengan tajuk Revolusi Harmoni (Alam, et al., 2017: 145).

Kemunculan *political volunteer* yang mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK pada Pilpres Tahun 2014 menggegerkan dunia politik nasional. Terdapat beberapa relawan dengan skala besar yang mendukung Jokowi-JK, diantaranya : Jasmev, Seknas Jokowi, Pro Jokowi (Pro-Jo), Garda Pemuda Nasdem, Garda Bangsa, Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP), Pusat Informasi Relawan Jokowi-JK, Duta Jokowi, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), *Entrepreneur and Professional for Jokowi (EP for Jokowi)*, Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Forum Alumni

Perguruan Tinggi, Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB), *Jenggala Center*, Kawan Jokowi, dan Revolusi Harmoni (Purboningsih, 2015: 112).

Pada Pilpres Tahun 2019 kedua pasangan Capres dan Cawapres sama-sama menyatakan bahwa mereka didukung oleh simpul-simpul kekuatan masyarakat yang menyebut dirinya sebagai relawan. Fenomena relawan pada kontestasi Pilpres mengalami peningkatan, pada Pilpres Tahun 2019 gerakan relawan sangat menjamur dari tingkatan daerah sampai tingkatan nasional. Mulai relawan dari kalangan Partai Politik sampai relawan dari kalangan masyarakat yang tergabung dalam unsur pemuda, agama bahkan unsur pendidikan SMA atau perguruan tinggi (Purboningsih, 2015).

Kubu Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres Tahun 2019 memiliki 2.000 kelompok relawan yang terdaftar di Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mengklasifikasi relawan dalam enam kategori, diantaranya : relawan Jokowi (68%), relawan Ma'ruf Amin (12%), relawan daerah (48%), relawan berbasis gender (5%), relawan berbasis komunitas (25%), dan relawan berdasarkan profesi (25%). Kubu Prabowo-Sandiaga juga menggunakan relawan untuk menggerakkan mesin politiknya di lapangan. Prabowo-Sandiaga disokong sekitar 1.300 kelompok relawan yang terdaftar di Badan Pemenangan Nasional. Sebanyak 70% relawan dari Prabowo-Sandiaga berasal dari kalangan emak-emak. Misalnya, relawan emak-emak militan yang bergerak di Jawa Barat, Medan, Aceh, Bogor, dan Jakarta. Partai

emak-emak pendukung Prabowo-Sandi (Pepes) yang memiliki fokus untuk menggarap pulau Jawa, dengan Jawa Barat sebagai prioritasnya (Teresia, 2019).

Relawan politik dalam rangka memenangkan calon pada politik elektoral dapat dikatakan sebagai kekuatan besar yang mampu menyaingi kekuatan Partai Politik. Hal ini didasari dengan kemunculan relawan politik yang mampu memenangkan pasangan Jokowi-JK dalam kontestasi Pilpres Tahun 2014. Kekuatan relawan politik juga dapat dilihat dari keberhasilan relawan Teman Ahok dalam mengumpulkan satu juta KTP warga DKI Jakarta untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Terlepas pada akhirnya Basuki Tjahaja Purnama diusung oleh Partai Politik, tetapi relawan Teman Ahok sebagai warga biasa mampu membangun jaringan massa sedemikian luas tanpa adanya susunan organisasi yang terstruktur seperti Partai Politik (Alam, et al., 2017: 147).

Ciri yang khas dari gerakan kerelawanan adalah bentuknya yang lintas identitas namun disatukan oleh kepentingan bersama. Relawan lebih pro aktif pada isu atau keprihatinan bersama dan tergerak melakukan sesuatu. Baru kemudian membuat organisasi dan melakukan kerja organisasi. Bersama relawan, kebutuhan politik akar rumput menemukan bentuknya. Gerakan relawan mengambil bentuk partisipatif kritis sekaligus tetap berbasis pada isu, bukan pada kepentingan politik praktis (Projo, 2017).

1.3 Relawan Politik Pro-Jo

Fenomena Pilpres Tahun 2014 menyisakan fenomena menarik dengan menjamurnya voluntarisme politik, yang termanifestasikan sebagai bagian dari partisipasi politik masyarakat. Berbagai elemen masyarakat tampak sangat antusias memberikan dukungan politik secara sukarela dalam seleksi kepemimpinan nasional tersebut. Semangat yang tinggi dari masyarakat itu ditandai dengan semaraknya proses kampanye politik dan merebaknya isu-isu terkait Pilpres, hal ini tidak hanya didunia nyata tetapi juga didunia maya. Keberadaan voluntarisme menguat melalui varian gerakan yang dinamis. Salah satunya adalah Pro-Jo.

Berasal dari bahasa Sansekerta, Pro-Jo atau *praja* berarti pemerintahan, negeri, kerajaan atau istana. Dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Jadi orang-orang yang mengaku Pro-Jo adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyatnya. Nama Pro-Jo dipilih selain gampang diingat juga merupakan akronim dari Pro Jokowi. Pro-Jo dideklarasikan 21 Desember 2013, deklarator Pro-Jo rata-rata adalah kader PDI Perjuangan atau aktivis mahasiswa 1998, misalnya saja Budi Arie Setiadi, Dhani Marlene, Waway, Fahmi Alhabsyi, Jonacta Yani, Firmansyah, Soni dan banyak aktivis lainnya. Kelompok relawan Pro-Jo juga banyak diisi oleh para aktivis yang sebelumnya tergabung ProMeg yang diinisiasi tahun 1998 silam (Projo, 2017).

Pro-Jo dibentuk secara nasional, strukturnya membentang dari tingkat pusat, daerah, cabang hingga desa di seluruh Indonesia. Dalam memenangkan Jokowi sebagai Presiden, Pro-Jo mengandalkan dana swadaya dan mengambil bentuk

gerakan dengan aksi massa, advokasi sekaligus berinteraksi langsung dengan rakyat. Pro-Jo menetapkan tiga orientasi politik utama yakni, Pertama memperjuangkan Jokowi menjadi Presiden, Kedua memenangkan Jokowi menjadi Presiden dalam Pilpres 2014, dan yang Ketiga mengawal Jokowi sebagai Presiden (Projo, 2017). Berikut struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Pro-Jo Periode 2014-2019 :

Gambar 2.1 Struktur Kepengurusan DPP Pro-Jo Periode 2014-2019

Sumber : DPP Pro-Jo, 2014



DEWAN PIMPINAN PUSAT PROJO

Sekretariat : Jl. Pancoran Timur Raya No. 37, RT.09 RW 08, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

SUSUNAN PENGURUS

DEWAN PIMPINAN PUSAT PROJO

PERIODE 2014-2019

| | | | |
|------|---------------------------------------|---|---|
| I. | DEWAN PEMBINA | : | Ir. H. Joko Widodo |
| II. | DEWAN PENASEHAT | : | |
| | Ketua | : | Gunawan Wirosaroyo |
| | Anggota | : | (1) H. Suryo Sumpeno (2) Didi Heru Purnomo (3) Imam Mundjiat (4) Agnita Singedekane (5) Dewi Djakse (6) Syamsi Hasan |
| III. | DEWAN PENGURUS PUSAT | : | |
| | Ketua Umum | : | Budi Arie Setiadi |
| | Wakil Ketua Umum | : | Madchan Hadi Rusyanto |
| | Wakil Ketua Umum | : | Budianto Tarigan |
| | Sekretaris Jendral | : | Guntur Siregar |
| | Sekretaris Internal | : | Sinnal Blegur |
| | Sekretaris Eksternal | : | Yukendro Pramono |
| | Bendahara Umum | : | Dhany Marlen Purba |
| | Wakil Bendahara Umum | : | Dian Arie Yuliadi |
| IV. | KETUA BIDANG | : | |
| | Organisasi dan Keanggotaan | : | Freddy Damanik |
| | Ideologi Politik dan Kaderisasi | : | Mahendro Slamet Haryono |
| | Hubungan antar Lembaga | : | Liza Basalamah |
| | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | : | Silas Dutu |
| | Pembangunan Desa | : | Azis Hermanto |
| | Pendidikan dan Kesehatan | : | Yoska Oktaviano |
| | Energi | : | Handoko |
| | Hukum dan Konstitusi | : | Sunggul Hamonangan Sirait |
| | Sosial Media | : | Margiyono Darsasumardja |
| | Komunikasi Informasi | : | Candi Sinaga |
| | Litbang dan Analisa Kebijakan | : | Daniel Hutagalung |
| | Pengabdian Sosial | : | Ina Amania |
| | Buruh, Tani, dan Nelayan | : | Panel Barus |
| | Koperasi dan UKM | : | Franko Maukar |
| | Pemberdayaan Perempuan | : | Cahaya Sinaga |
| | Pemuda dan Olahraga | : | Jimmy C.E Matitaputty |
| | Maritim | : | Ronny Ari Wibowo |
| | Energi dan Lingkungan Hidup | : | M. Arifin Baso |
| | Infrastruktur dan Transportasi Publik | : | Saptandri Widyanto |
| | Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif | : | Teuku Rino |
| | Perumahan Rakyat | : | Wisnu Wardana |
| | Agraria | : | Haposan Situmorang |
| | Luar Negeri | : | Aloysius Rebong |

Pada saat acara Rakornas II Pro-Jo, 23 Agustus 2014. Pro-Jo merasa telah menuntaskan tugasnya menghantarkan Jokowi menjadi Presiden. Sesuai dengan tiga orientasi politik utama Pro-Jo, dua dari tiga orientasi politik tersebut sudah tercapai dan menyisakan satu orientasi politik utama Pro-Jo yakni mengawal Jokowi sebagai Presiden. Dalam Kongres I Pro-Jo di Jakarta, Pro-Jo berniat membubarkan diri, namun dihadapan para relawan pada saat Rakornas II Pro-Jo 23 Agustus 2014 Jokowi menginstruksikan Pro-Jo untuk tidak membubarkan diri dan Pro-Jo bertransformasi menjadi sebuah ormas (Projo, 2017).

Pergantian Sekretaris Jendral Pro-Jo menjelang Rakornas III Pro-Jo pada tanggal 4-5 Desember 2017 terjadi, Guntur Siregar yang pada awalnya menjabat sebagai Sekrtaris Jendral dilengserkan melalui surat bernomor 141/Internal/DPP-PROJO/XII/2017 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pro-Jo pada tanggal 1 Desember 2017 dan digantikan oleh Handoko. Beberapa nama lain di kepengurusan DPP Pro-Jo juga berganti menjelang Pilpres 2019 karena beberapa nama tersebut berpindah mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019, termasuk Bendahara Umum Pro-Jo yang pada awalnya dijabat oleh Dhany Marlen Purba digantikan oleh Panel Barus.

Pro-Jo sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) membuka dirinya kepada siapa saja yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk bergabung. Pro-Jo bukanlah *underbow* atau sayap Partai Politik, tidak terafiliasi dengan Partai Politik mana pun. Pro-Jo mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung

Jokowi, menjadikan dirinya sebagai mata dan telinga, dan melepaskan dirinya dari kepentingan politik praktis. Pada dasarnya Pro-Jo independen, mendukung Jokowi karena memiliki cita-cita politik yang sama, semangat akan kemandirian bangsa (Projo, 2017).

Munculnya relawan politik secara masif dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi Partai Politik yang memiliki fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik. Weber (1990) menyebutkan bahwa Partai Politik sebagai anak kandung demokrasi. Di sisi lain, demokrasi tidak dapat hidup dengan baik dan layak tanpa kehadiran Partai Politik (Schattschneider, 1942). Peningkatan kualitas tata kelola Partai Politik harus terus dilakukan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari belum teraktualisasikannya dimensi institusionalisasi Partai Politik. Sebagaimana diungkapkan Mainwaring (1998) salah satu ciri masih lemahnya institusionalisasi Partai Politik adalah rendahnya tingkat *party identity* (Party ID) di Indonesia.

Party identity (Party ID) pada awalnya didefinisikan sebagai rasa keterikatan pribadi atau individu terhadap Partai Politik pilihannya (Campbell et al. 1954 ; lihat juga Campbell et al. 1961). *Party ID* merupakan derajat kedekatan warga dengan Partai Politik yang diyakininya untuk dipilih saat Pemilu dilaksanakan. Ini jelas mengacu pada identifikasi psikologis. Konsep itu diturunkan dari referensi dan teori kelompok kecil yang menyatakan bahwa perasaan diri seseorang termasuk perasaan identitas pribadi dengan kelompok sekunder seperti Partai Politik (Miller & Shanks, 1996 : 120).

Permasalahan di Indonesia saat ini adalah lemahnya *Party identity* (Party ID). Hal ini sejalan dengan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia. Indikator (2021) menjelaskan hasil survei nasional kepada 1.200 responden hanya 6,8 persen yang menyatakan bahwa merasa dekat dengan salah satu Partai Politik, 92,3 persen menjawab tidak ada dan 0,9 persen tidak menjawab.

Partai hanya dapat bertahan ketika kehadiran Partai Politik dirasakan masyarakat. Apapun ideologi sebuah Partai Politik hanya akan terinstitusionalisasi jika sedari awal berdirinya hingga melewati tahun-tahun Pemilu, para kandidat bergerak meyakinkan pemilih untuk memenangkan kursi parlemen (Maor, 1997). Pergerakan para kandidat juga harus simultan dan konsisten sehingga tumbuh relasi antara kader Partai Politik dan pemilih.